

## MANAJEMEN STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGATASI ANCAMAN IDEOLOGI SELAIN PANCASILA UNTUK Mendukung PERTAHANAN NEGARA

### GOVERNMENT'S STRATEGIC MANAGEMENT TO OVERCOME IDEOLOGICAL THREATS OTHER THAN PANCASILA TO SUPPORT STATE DEFENSE

Octari Annisa<sup>1</sup>, Herlina J.R Saragih<sup>2</sup>, Pujo Widodo<sup>3</sup>

UNIVERSITAS PERTAHANAN

(octariannisa@gmail.com, herlinasara897@gmail.com, pujowidodo78@gmail.com)

**Abstrak** – Eksistensi ideologi Pancasila pasca reformasi berada pada ruang yang ambigu, tidak pasti, diantara berguna dan tidak berguna. Kehadiran internet (*Internet of Things*) telah merubah banyak hal sehingga terjadinya pergeseran nilai dalam kehidupan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Peneliti bertujuan terbentuknya sumber daya yang unggul berjiwa Pancasila melalui manajemen strategi pemerintah dalam mengatasi ancaman ideologi selain pancasila dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dengan teknik analisis data meliputi pengumpulan, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman ideologi selain Pancasila tidak hanya faktor agama seperti tindakan radikalisme, ekstrimisme, namun juga meliputi ancaman dari aspek sosial dan ekonomi seperti lemahnya penanaman nilai budaya nasional dan kearifan lokal, kemudian bersumber dari sistem ekonomi yang tidak berasaskan Pancasila, penegakan hukum yang tidak adil, dan kepentingan kelompok tertentu yang tidak menggunakan platform Pancasila. Manajemen strategi yang dilakukan pemerintah untuk penguatan ideologi Pancasila sudah cukup baik dari sisi formulasi strategi. Pada sisi implementasi strategi, masih belum ditemukan pengukuran ketetapan sasaran yang tepat. Rekomendasi dalam penelitian pertama, agar dilakukan penguatan BPIP terhadap kapasitas, sdm dan manajerial. Kedua, implementasi strategi penguatan ideologi Pancasila menggunakan pendekatan yang bersifat non formal seperti melalui karya seni dan menjadi indikator perilaku di tengah masyarakat. Ketiga, untuk menghadapi ancaman tersebut dapat dilakukan melalui institusi pendidikan, pembuatan indikator pengukuran Pancasila, dan memperbaiki mental masyarakat.

**Kata Kunci:** Manajemen Strategi, Ideologi, Pancasila, Pemerintah, BPIP

**Abstract** – In the current era of globalization, the Pancasila ideology as the basis of the state and the way of life is increasingly being abandoned by the Indonesian people. Pancasila as an ideology is placed in an ambiguous space, between useful and useless. This is a threat to the Indonesian nation where the presence of the internet (*Internet of Things*) has changed many things such as a shift in values in life related to humanity. Researchers aim at the formation of superior resources with the spirit of Pancasila through government strategic management in overcoming ideological threats other than Pancasila by using qualitative research methods. The data collection technique uses the method of observation, interviews, and documentation, as well as with data analysis techniques including collection, condensation, presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the threat of ideology besides Pancasila is not only religious factors such as acts of radicalism, extremism, but also includes threats from social and economic aspects such as weak cultivation of national cultural values and local wisdom, then comes from an economic system that is

<sup>1</sup> Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>2</sup> Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan.

<sup>3</sup> Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan.

not based on Pancasila, law enforcement which is unfair, and the interests of certain groups that do not use the Pancasila platform. The strategic management carried out by the government to strengthen the Pancasila ideology is quite good in terms of strategy formulation. On the strategy implementation side, there is still no precise measurement of target setting. Recommendations in the first research, that BPIP strengthening of capacity, human resources and managerial. Second, the implementation of the strategy to strengthen the Pancasila ideology uses a non-formal approach such as through works of art and becomes an indicator of behavior in society. Third, to deal with these threats can be done through educational institutions, making indicators of measuring Pancasila, and improving the mentality of the community.

**Keywords:** Strategic Management, ideology, Pancasila, Government, BPIP

## Pendahuluan

Ideologi Pancasila merupakan keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia, dimaksudkan bahwa kehidupan kenegaraan dan warga negara diarahkan untuk mencapai tujuan negara melalui Pancasila (Bakry dalam Taniredja et al., 2010). Oleh karena itu ideologi Pancasila mesti melembaga dalam setiap individu warga negara untuk dapat meraih tujuan negara yang telah termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar negara yang berarti Pancasila dijadikan dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Ideologi Pancasila sejak ditetapkan sebagai ideologi negara, mengalami transformasi berkenaan dengan kondisi lingkungan yang terjadi pada zamannya. Secara garis besar diperiodesasikan pada tiga babak yakni masa Presiden Soekarno, masa Presiden Soeharto, dan masa Reformasi. Presiden Soekarno berusaha menyatukan kekuatan nasional yang terjadi saat itu, dengan membentuk front nasional yang dikenal dengan istilah Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis). Pada perkembangannya Partai Komunis Indonesia (PKI) bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan

ideologi komunis. Puncak pergerakan PKI ditandai dengan meletusnya pemberontakan G 30 S/PKI pada tahun 1965. Meresponi realitas saat itu MPRS mengeluarkan Ketetapan MPRS RI No XXV/MPRS/1966. Kemudian ketetapan ini dimasukkan dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 a menyatakan bahwa siapapun yang menyebarkan ajaran Komunisme/ Marxisme - Leninisme akan dikenakan pidana.

Pada pemerintahan Presiden Soeharto Pancasila memiliki ruang yang terbuka dan berkembang menjadi azas tunggal. Melalui TAP XX/MPRS/1966 Pancasila semakin memiliki dasar yang kuat sebagai ideologi kebangsaan. Pancasila diposisikan sebagai instrument kunci untuk terjaminnya stabilitas nasional serta digunakan sebagai legitimasi terciptanya persatuan dan kesatuan. Puncak dominasi Pancasila pada periode ini dengan diharuskannya semua organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik kepartaian, menggunakan Pancasila sebagai asas tunggal. Merujuk pada UU RI Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dilain pihak pada periode ini dikatakan bahwa Pancasila digunakan sebagai tameng untuk melanggengkan kepentingan penguasa. Puncak dinamika terjadi pada krisis tahun 1997-1998 yang pada akhirnya turunnya jabatan Presiden Soeharto dan babak baru dimulai dengan istilah reformasi.

Pasca reformasi terjadi perubahan ruang bagi ideologi Pancasila itu sendiri dimana Pancasila tidak lagi dianggap populer. Selain itu terjadi perubahan wacana dan paradigma terhadap Pancasila dari state center menjadi people center terhadap peran dan kedudukan Pancasila (Rachman et al., 2012:35). Proses delegitimasi kekuasaan Negara yang terjadi, telah membuka ruang munculnya gerakan-gerakan tandingan di luar lembaga kenegaraan yang dimotori oleh aktor-aktor non Negara. Berbarengan dengan itu dinamika arus globalisasi yang disertai dengan perangkat demokratisasi, memudahkan nilai-nilai Pancasila, dilihat dari fenomena adanya kelompok yang tidak setuju dengan Pancasila.

Ancaman terhadap eksistensi ideologi Pancasila didasarkan pada asumsi bahwa meskipun sebuah kelompok atau organisasi secara komunal telah dibubarkan legalitasnya, namun secara personal ideologi pada diri individu tetap saja menetap. Oleh sebab itu, perbedaan ideologi yang diakui secara resmi menjadi lebih penting dan dapat menimbulkan konflik yang serius. Jika jumlah penganut ideologi yang saling bertentangan cukup besar, dan kuantitasnya cukup banyak, stabilitas suatu Negara dapat terpengaruh.

Meresponi dinamika dan situasi lingkungan yang terjadi, pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan upaya penguatan ideologi Pancasila dengan mendirikan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-IP) pada tahun 2017. Unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden ini kemudian direvitalisasi pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden RI No 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sistem pertahanan dan ideologi adalah dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Sistem pertahanan di Indonesia bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang disiapkan secara dini oleh pemerintah secara total, terpadu dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dan warga Negara dari segala bentuk ancaman baik militer maupun militer, ancaman tradisional dan non tradisional, serta ancaman actual maupun potensial.

Sehubungan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan yang lemah pada suatu negara akan menciptakan ketidakpercayaan bagi warga negara sendiri maupun dari negara lainnya. Sebaliknya keberhasilan suatu negara dalam mengembangkan tugasnya sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintahannya untuk dapat dipercaya, dihormati, dan disegani. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan adalah serangkaian kompleksitas yang diwujudkan melalui bentuk integritas penyelenggara negara yang dalam hal ini adalah pemerintah. Oleh karena itu untuk mencapai sistem pertahanan Negara yang kuat dalam dimensi ideologis pemerintahan memainkan peranan penting untuk tercapainya tujuan.

Indonesia dimasa mendatang diproyeksikan akan berhadapan dengan bonus demografi, sehingga pembangunan sumber daya memegang peranan kunci dalam pembangunan dan bangsa dan negara dimasa mendatang. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dan berperan penting dalam menentukan arah pembangunan di masa mendatang perlu menyiapkan strategi-strategi khusus untuk memperkuat keberadaan Pancasila sebagai Ideologi. Manajemen strategi adalah pendekatan

yang sistematis dalam menyelenggarakan program negara untuk mencapai tujuan bernegara. Melalui manajemen strategis pemimpin pada level tertinggi dapat merumuskan dan menentukan strategi yang tepat. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ancaman ideologi selain Pancasila?
- b. Bagaimana manajemen strategi pemerintah untuk penguatan ideologi Pancasila?

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang di gunakan ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan penentuan informan purposive sampling. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi untuk menguji kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian (Moleong, 2014). Teknik analisis data digunakan dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data (Miles, 2014).

### Hasil dan Pembahasan

#### Manajemen Strategi Pemerintah untuk Penguatan Ideologi Pancasila.

Pemerintah senantiasa dihadapkan pada dua istilah yaitu kewenangan (*authority*) dan kekuasaan (*power*). Menurut Makmur (2009) kewenangan dalam pemerintah dibatasi dalam konteks ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kewenangan yang melampaui batas akan berurusan dengan hukum. Sementara kekuasaan pemerintah memiliki batasan yang tidak jelas, dan lebih diidentikkan dengan kepemilikan. Sehingga artian

penggunaannya tidak terbatas dan sangat tergantung pada pemiliknya, oleh sebab itu terjadi perkembangan makna atas kekuasaan. Dari dua istilah yang dikedepankan tadi, peneliti dalam konteks ini menempatkan pemerintah dalam sudut pandang kewenangan (*authority*).

Manajemen strategis diartikan sebagai arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa manajemen strategi pemerintah merupakan upaya pengembangan strategi oleh instansi yang memiliki kewenangan. Manajemen strategik pemerintah berarti upaya untuk menata instansi dalam mencapai tujuan instansi melalui perumusan strategi, analisis internal eksternal, pengimplementasian dan evaluasi.

Sehubungan dengan penguatan ideologi Pancasila, instansi yang memiliki kewenangan untuk penguatan ideologi Pancasila dan menjalankan strategi sesuai tujuan yang ditetapkan ialah Deputi VI Kesatuan Bangsa - Kemenko Polhukam, Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan – Kemendagri, dan BPIP. Manajemen strategi terdiri dari fungsi formulasi, fungsi implementasi dan fungsi evaluasi.

Formulasi strategi Pemerintah dalam hal ini BPIP dalam upaya penguatan ideologi Pancasila dimuat dalam Renstra BPIP tahun 2020-2024 yang merujuk pada RPJMN IV 2020-2024. Renstra BPIP tahun 2020-2024 memuat analisis lingkungan, penetapan visi, penetapan misi, strategi yang digunakan, tujuan yang akan dicapai, dan indikator sasaran. Hasil analisis lingkungan BPIP diperoleh gambaran bahwa BPIP merupakan satu-satunya lembaga negara yang fokus terhadap penguatan ideologi

Pancasila. BPIP memegang peranan kunci dalam perumusan kebijakan yang berhubungan dengan ideologi Pancasila, namun pembinaan ideologi dari sisi legislasi belum diatur dalam undang-undang. Sehingga memiliki kekuatan hukum yang kurang kuat dalam penyelenggaraannya. Sehubungan dengan potensi SDM yang disebutkan sebagai kekuatan, pada kenyataannya masih menjadi permasalahan di internal BPIP. Mengingat kebutuhan SDM dalam mengelola sebuah Badan Negara sangat penting dan utama. Dari segi kuantitas, jumlah SDM BPIP masih sangat terbatas sebagai sebuah badan negara. Dari data Laporan Kinerja BPIP yang diperoleh tercatat bahwa jumlah SDM/Pegawai BPIP per tanggal 18 November 2019 masih berjumlah 177 orang.

Dari gambaran visi BPIP telah menunjukkan komitmen terhadap penguatan ideologi Pancasila. Penguatan terhadap lembaga perlu dilakukan untuk mendukung penguatan ideologi Pancasila. Namun semestinya dimensi yang dituju dalam penguatan ideologi meliputi lima dimensi ideologi Pancasila (sila ke 1-5). Sedangkan misi BPIP secara umum telah menunjukkan komitmen terhadap penguatan ideologi Pancasila, sasaran dari penguatan ideologi Pancasila juga sudah dimunculkan dalam misi BPIP. Namun secara spesifik belum diperoleh gambaran pengembangan visi dari BPIP. Adapun tujuan yang ditetapkan oleh BPIP menyangkut legalitas penguatan pembinaan ideologi Pancasila yang kemudian menghasilkan produk undang-undang, penguatan fungsi BPIP sebagai badan coordinator pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan Negara pada kementerian/lembaga/instansi/ di Pemerintahan Pusat dan Daerah. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan oleh BPIP dilengkapi dengan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis (IKSS) dan

target IKSS. Sasaran yang ditetapkan cenderung dari perspektif kinerja SDM BPIP sendiri. Perlu ditetapkan sasaran strategis penguatan ideologi Pancasila, sehingga diperoleh gambaran indeks kekuatan ideologi Pancasila itu sendiri.

Berkaitan dengan implementasi strategi meliputi serangkaian aktivitas diantaranya mengidentifikasi sasaran tahunan, mengembangkan strategi fungsional dan mengkomunikasikan kebijakan.

Secara umum BPIP telah melaksanakan program yang direncanakan. Namun kegiatan bagi generasi muda masih bersifat sosialisasi. BPIP dengan kewenangan yang dimiliki semestinya punya jangkauan yang lebih luas lagi. Terkait program terhadap kebijakan dan regulasi semestinya diperoleh output yang menyangkut generasi muda.

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses manajemen strategi, dimana seluruh subjek dimodifikasi untuk masa mendatang. Evaluasi strategi meliputi review atas faktor eksternal dan internal strategi, mengukur kinerja, dan mengambil tindakan perbaikan. Sehubungan dengan hasil penelitian yang ditemukan evaluasi strategi BPIP dilaksanakan melalui Dpeuti V Pengendalian dan Evaluasi pada tahun 2019. Belum ditemukan perkembangan pengendalian dan evaluasi terhadap penguatan ideologi Pancasila yang baru.

### **Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan**

Manajemen strategi yang dilakukan pemerintah untuk penguatan ideologi Pancasila sudah cukup baik dari sisi formulasi strategi. Namun pada sisi implementasi strategi, masih belum ditemukan pengukuran ketetapan sasaran yang tepat. Sebab dampak dari implementasi strategi yang telah

berlangsung yakni dari Deputi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam dengan dikeluarkannya rekomendasi terhadap K/L. Namun rekomendasi tersebut membutuhkan umpan balik dari tiap-tiap K/L agar terjalin sinergitas dalam upaya penguatan ideologi Pancasila. Adapun dari sisi evaluasi strategi, masih belum ditemukan sinkronisasi evaluasi dari Direktorat Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan – Kemendagri dan BPIP terhadap penguatan ideologi Pancasila.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang diuraikan diatas, maka peneliti merekomendasikan: a) Perlunya penguatan instansi BPIP baik kapasitas organisasi, sumber daya manusia, dan manajerial. Sebab apa yang sudah berjalan dirasa belum maksimal karena belum ada langkah gerak yang sama dari masing-masing sektor. b) Pemerintah perlu melakukan komitmen bersama terhadap penguatan ideologi Pancasila dengan menetapkan sasaran objek tujuan prioritas yang jelas. Sehingga program yang dilaksanakan dapat diukur ketetapan sasarannya. Kemudian dibutuhkan produk pedoman untuk penguatan ideologi Pancasila yang menjadi acuan oleh K/L, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan masyarakat untuk melaksanakan penguatan ideologi Pancasila sesuai dengan kewenangan masing-masing sektor. c) Implementasi manajemen strategi penguatan ideologi Pancasila, pendekatan yang digunakan masih bersifat formal seperti sosialisasi, FGD, dan seminar atau talkshow. Diharapkan

ke depan menggunakan pendekatan yang bersifat non formal seperti melalui karya seni dan menjadi indikator perilaku di tengah masyarakat. Misalnya pengukuran kinerja individu didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. d) Evaluasi strategi pemerintah masih bersifat tertutup dilembaga internal. Diharapkan kedepan evaluasi strategi tersebut dikeluarkan per akhir tahun terhadap public sehingga terlihat fenomena yang terjadi bagaimana.

### Daftar Pustaka

- Makmur, 2009. Teori Manajemen Strategik Dalam Pemerintahan dan Pembangunan. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Miles, H. d. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta : UI Press.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Taniredja, T., Supriadi, A., Harmanto, & Ridha, M. (2014). *Kedudukan dan Fungsi Pancasila bagi Bangsa dan Negara Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- UU RI Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Peraturan Presiden RI No 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
- Ketetapan MPRS RI No XXV/MPRS/1966.